

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian Teoritis

##### 1.1. Pengertian Strategi politik

Dalam kamus Longman Dictionary of Contemporary English, arti dari strategi adalah *strategy is a particular plan for winning success in particular activity, as in war, a game, a competition, or for personal advantage.*<sup>1</sup>

Jadi, strategi merupakan perencanaan dalam mensukseskan tujuan dalam segala aktifitas. Baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi maupun yang lainnya. Kemudian, seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang manajemen, kata strategi yang biasa di gunakan organisasi profit dan non profit, sering digabungkan dengan perencanaan strategi maupun manajemen strategi. Perencanaan strategi dimaknai rancangan yang bersifat sistemik dilingkungan sebuah organisasi. Sedangkan manajemen strategi mempunyai definisi yang berbeda-beda.

Yang pertama, *proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.*<sup>2</sup> Dilihat dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara rinci, yaitu; manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan, *kedua*, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang menyeluruh dan mendasar. *Ketiga*, pembuatan keputusan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sebagai penanggung jawab utama dalam keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah organisasi. *Keempat*, pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi. *Kelima*, keputusan tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan/pelaksanaan pekerjaan yang terarah.

---

<sup>1</sup> Kamus Longman Dictionary of Contemporary English, The Pitman Press, Bath, Great Britain, 1982

<sup>2</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005), hal.148

Yang kedua, *usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah di tentukan.*<sup>3</sup>

Yang ketiga, *arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang bersifat efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi.*<sup>4</sup>

Yang kelima atau terakhir, *perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategic) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi) dan ditetapkan sebagai keputusan mahaem puncak (keputusan yang mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi) dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan Operasional) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategi) dan berbagai sasaran (tujuan Operasional) organisasi.*<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Michael Allison dan Jude Kaye, Strategi adalah proses sistemik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara *stakeholder* utama-tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi.<sup>6</sup>

Jadi, strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikannya dalam mencapai tujuan memenangkan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan.

Sedangkan strategi yang berkaitan dengan Pembangunan Sosial adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikan inklusi sosial dalam rangka memenangkan pemilu 2009.

## **1.2. Pengertian Partai Politik**

---

<sup>3</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*

<sup>4</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005), hal.149

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*

<sup>6</sup> Michael Allison, dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal. 1

Partai politik merupakan keharusan dalam sistem politik yang demokratis terkecuali masyarakat tradisional yakni suatu sistem yang otoritarian dimana seorang raja tergantung pada tentara atau polisi dalam melangsungkan pemerintahannya.<sup>7</sup> Sedangkan fungsi mendirikan partai politik pada umumnya adalah representasi (keterwakilan), konversi dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan serta control terhadap pemerintah.<sup>8</sup>

Beberapa konsep mengenai partai politik masih menjadi perdebatan dikalangan ilmuan, Paige Johnson Tan yang mengamini pendapat Giovanni Sartori mendefinisikan partai politik adalah kelompok politik apa saja yang ikut serta dalam pemilu dan mampu menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan publik.<sup>9</sup>

Sedangkan Menurut Sigmund Neumann dalam karyanya, *Modern Political Parties*, mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

*A Political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views*<sup>10</sup> (Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).

---

<sup>7</sup> Ichlasul Amal (ed), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hal. 18

<sup>8</sup> Ichlasul Amal (ed), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hal. 27. Sedangkan dalam Undang –undang Nomer 02 tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan fungsinya adalah sebagai pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; menyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; partisipasi politik warga Negara Indonesia dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Secara keseluruhan fungsi diatas dapat diwujudkan melalui konstitusional.

<sup>9</sup> Paige Johnson Tan, *Political Parties and the Consolidation of Democracy in Indonesia*, worker Paper, Departement of Political Science, University of Nort Carolina, Wilmington, tanpa tahun, hal. 6. Lihat juga, Giovanni Sartori, *Parties and Party Sistem: A Framework for Analysis*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). Konsep ini juga di kutip oleh Akbar Tandjung dalam *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 1

<sup>10</sup> Sigmund Neumann, *Modern Political Parties*, dalam *comparative a Reader*, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press Glencoe, 1963), hal. 352 juga di kutip Meriam Budiarmo dalam bukunya, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 404

Pada konteks sistem politik Indonesia, DPR RI mendefinisikan partai politik berdasarkan Undang-undang Nomer 02 tahun 2008 tentang partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

### 1.3. Konsep Pembangunan Sosial

Menurut Anthony Hall & James Midgley bahwa *social development* adalah proses dari perencanaan perubahan sosial untuk meningkatkan populasi kesejahteraan yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi.<sup>12</sup>

Menurut Servaes arah dan kekuatan pembangunan di suatu Negara bersifat relatif sehingga tidak ada satupun entitas kenegaraan yang bisa mengklaim bahwa Negeranya telah membangun secara permanen apalagi final. Lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan mengacu konsep *another development*, Servaes menjelaskan bahwa; pembangunan berorientasi pada untuk memenuhi kebutuhan manusia; *material* dan *immaterial*. *kedua*, pembangunan berorientasi pada kepentingan masyarakat, berbasis pada berbagai sistem nilai dan pandangan tentang masa depan, oleh sebab itu butuh pembangunan yang tidak bersifat tunggal, berdasarkan situasi dan kondisi Negara. *ketiga*, pembangunan yang berorientasi pada asas 'berdikari', karena itu, setiap anggota masyarakat harus mampu memberdayakan potensi, lingkungan dan budayanya sendiri. *keempat*, pembangunan yang berorientasi pada system lingkungan, karena itu, pemanfaatan sumber daya perlu dikaitkan keterbatasan sumberdaya lingkungan, lokal maupun global. *Kelima*, pembangunan yang berbasis pada transformasi struktural: dalam hubungan sosial, ekonomi dan distribusi ruang, sebagaimana berlaku pada struktur kekuasaan untuk mewujudkan sumber daya

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomer 02 tahun 2008 tentang Partai Politik

<sup>12</sup> Lihat Anthony Hall & James Midgley, *Social Policy for Development* (London: Sage Publications, 2004), hal. xv

berbasis swakelola (*self-management*) juga partisipasi semua pihak pada semua tingkatan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>13</sup>

Konsep pembangunan sosial pada Orde Baru masih bersifat *top-down*, yaitu sentralistik dan tidak banyak melibatkan potensi masyarakat untuk melakukan partisipasi secara aktif.<sup>14</sup> Pasca Orde Baru, konsep ini berubah menjadi *bottom-up planning*. Konsep tersebut, menurut Sumodiningrat lebih memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan, proses tersebut sebagai upaya untuk mendirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya.

#### 1.4. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi adalah Sebagai bagian dari fungsi partai politik, menurut Roy C. Macridis partisipasi politik berdiri diantara mobilisasi dan sosialisasi. Partai, dengan mobilisasi dan menetapkan tingkat partisipasi yang mengintegrasikan individu ke dalam suatu sistem politik. Partai membentuk ikatan-ikatan rasional dan efektif antara individu dan sistem politik serta mengubah menjadi warga Negara dan menjadi pemerintahan yang responsive.<sup>15</sup>

Di negara demokratis, konsep partisipasi politik merupakan faham dimana kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat tersebut. Dengan partisipasi dalam prosesi politik mendorong aspirasi dapat tersalurkan dengan kata lain mempunyai efek politik dalam mengambil keputusan.

Herbert McClosky<sup>16</sup> berpendapat tentang partisipasi politik sebagai berikut:

*The term political participation will refer to those voluntary activities by wich members of a society share in the selection of rulers and directly or indirectly in the formation of public.* (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum).

---

<sup>13</sup> Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, volume xvii (1), 2009

<sup>14</sup> Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 52

<sup>15</sup> Ichlasul Amal (ed), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hal. 28

<sup>16</sup> Herbert McClosky, *Political Participation, international Encyclopedia of the Sosial Sciences*, ed. Ke-2 (new York: The Macmillin Company, 1972), XII, hal. 252, yang juga termaktub dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik* karangan Prof Miriam Budiardjo, hal. 367

Sedangkan Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba:

*By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the action they take* (partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Menurut Myron Weiner, ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik,<sup>17</sup> yaitu:

*Pertama, modernisasi:* komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca-tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media komunikasi massa.

*Kedua, perubahan-perubahan Struktur Kelas Sosial.* Terbentuknya kelas menengah yang begitu luas mengakibatkan proses partisipasi politik penting dalam rangka perubahan-perubahan keputusan politik. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

*Ketiga, pengaruh kaum intelektual dan komunitas massa Modern.* Kaum intelektual sejak lama menjadi *agen of change* sikap dan tingkah laku kelas sosial lain. Seperti ide demokratisasi dan partisipasi yang telah tersebar ke bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.

*Keempat, konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik.* Dalam kompetisi perebutan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan adalah membangun partisipasi masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan politik. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan idea-idea partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar hak-hak ini terpenuhi. Jadi, kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum aristokrasi telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

---

<sup>17</sup> Lihat Dr. Mohtar Mas' oed dan Dr Colin Mac Andrews (editor), *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991), hal. 45

*Kelima*, keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan Sosial, Ekonomi dan kebudayaan. Perluasan kegiatan pemerintah dalam menyusup wilayah-wilayah pemerintahannya menjadi konsekuensi logis dalam mempengaruhi partisipasi politik warga terhadap pemerintah.

Dalam hal ini penulis lebih condong pada konsep Verba tentang partisipasi politik dimana kegiatan warga negara yang legal yang sedikit banyak secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan yang diambil oleh mereka.

#### **1.4.1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Almond menjelaskan, ada dua bentuk partisipasi politik, yaitu konvensional dan non-konvensional dilihat dari berbagai Negara dan waktunya. *Pertama*, partisipasi politik yang bersifat konvensional, yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Dan kedua, non-konvensional termasuk yang mungkin legal (seperti petisi, demonstrasi dan lain-lain) maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.<sup>18</sup>

Pemberian suara (*voting*) merupakan bentuk partisipasi politik yang aktif yang dipakai di hampir semua sistem politik, baik yang demokratis maupun yang otoriter. Di Negara otoriter, pemilihan umum tidak dimaksud untuk memberi kesempatan pada rakyat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tetapi lebih memberi kesempatan pada kaum elit yang berkuasa untuk berpropaganda dan memobilisasikan rakyat.

Siapa saja yang berpartisipasi politik? dibanyak Negara, pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik. Biasanya dalam dunia pendidikan menginformasikan tentang hak-hak dan kewajiban politik. Selain pendidikan tinggi, **Almond** menjelaskan tentang posisi kaum muda yang terpelajar sebagai agen yang berpartisipasi dalam politik. Kemudian perbedaan jenis kelamin dan status sosial-ekonomik yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi. Seperti, laki-laki lebih aktif dibandingkan perempuan; orang yang berstatus sosial-ekonomi lebih tinggi lebih aktif daripada yang rendah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Gabriel A. Almond dalam Mohtar Mas' oed dan Dr Colin Mac Andrews (editor), *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1991), hal. 46

<sup>19</sup>. Mohtar Mas' oed dan Dr Colin Mac Andrews (editor), hal. 49

Bentuk partisipasi politik dalam penulisan ini, akan memakai konsep Almond tentang bentuk konvensional yaitu pemberian suara (*voting*) pada pemilu 2009.

### 1.5. Pengertian Elit

Elite selalu sedikit itulah jawaban awal dari pertanyaan ini. Jumlah elite selalu lebih sedikit dibandingkan dengan yang dikuasai, kenyataannya secara praktis tidak mungkin dan tidak seharusnya terjadi sebaliknya. Sudah menjadi dalil pemikiran politik bahwa kekuasaan dalam masyarakat didistribusikan dengan tidak merata. Sebagaimana dikatakan oleh Gaetano Mosca yang dikutip oleh Robert D. Putnam:

*Dalam setiap Masyarakat..terdapat dua kelas penduduk-satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai-. Kelas pertama, yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu.<sup>20</sup>*

Selain Mosca ada pemikiran dari Vilfredo Pareto dan Robert Michels yang lahir pada pergantian abad ini. Azas-azas umum yang sama-sama mereka anut adalah:

1. Kekuasaan politik, seperti halnya barang-barang sosial lainnya didistribusikan dengan tidak merata. Untuk menyelidiki perimbangan masyarakat apabila kita membagi kelas elit menjadi dua bagian: yaitu elit yang memerintah dan tidak memerintah. Kelas elit yang pertama termasuk mereka yang secara langsung atau tidak langsung memegang peran penting dalam kehidupan pemerintahan dan politik; kelas elit yang kedua terdiri dari sisanya, yaitu mereka yang tidak memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan politik.<sup>21</sup> Gagasan dasar Pareto ini sederhana tetapi memberikan penjelasan tentang elite

---

<sup>20</sup> Gaetano Mosca, *The Ruling Class* (New York: McGraw-Hill, 1939), hal. 50 yang tercantum dalam karya Mohtar Mas' oed dan Collin McAndrews (eds), *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hal.77

<sup>21</sup> Mohtar Mas' oed dan Collin McAndrews (eds), *perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hal. 78



berdasarkan klasifikasi sosial yang berujud bisa berdasarkan kekayaan, kecakapan atau kekuasaan politik.

2. *Pada hakekatnya, orang yang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya.*
3. *Secara internal , elite itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok.* **Putnam** menjelaskan elite tidak hanya suatu kumpulan individu-individu yang saling terpisah, tetapi sebaliknya, seperti halnya anggota-anggota klub khusus dan terbatas, individu-individu yang ada dalam kelompok elite itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip, memiliki nilai-nilai kesetiaan dan kepentingan yang sama. Untuk itu ada yang mengatakan kelompok elite memiliki tiga K, yaitu kesadaran, keutuhan dan kebulatan tujuan kelompok.
4. *Elite itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sempit terbatas.* Pergantian dalam kepemimpinannya berasal dari kalangan istimewa yang terdiri dari beberapa orang.
5. Terakhir, dan arena hal keempat diatas, *kelompok elite itu pada hakekatnya bersifat otonom*, kebal akan gugatan dari siapapun diluar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik penting diselesaikan Menurut kepentingan atau tindakan kelompok ini.<sup>22</sup>

Itulah potret masyarakat yang digambarkan oleh teoritisi elite klasik. Robert Michels menegaskan bahwa adanya pembagian kerja yang diperlukan dalam setiap organisasi menyebabkan beberapa orang memperoleh kecakapan memimpin, sedang yang lain tidak memperoleh ini sehingga selalu menjadi obyek yang harus dipimpin.

Sedangkan Harold Laswell merumuskan konsep elite sebagai suatu kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat dalam arti bahwa nilai-nilai yang mereka ciptakan, hasilkan, mendapat penilaian tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai itu mungkin berupa kekuasaan, kekayaan, kehormatan, pengetahuan dan lain-lain. Artinya elite berhasil memiliki sebagian terbanyak dari nilai-nilai, karena

---

<sup>22</sup> Muhtar Mas' oed, hal 79

kecakapan-kecakapan serta sifat-sifat kepribadian mereka.<sup>23</sup> Laswell juga memberikan batasan elit politik yang mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan (*body politic*). Pemegang kekuasaan meliputi kepemimpinan dan formasi sosial dimana pemimpin-pemimpin secara tipikal dihasilkan dan yang menerima pertanggungjawaban dalam suatu periode tertentu.<sup>24</sup>

Dalam studi elit politik, yang paling tepat adalah mendefinisikan kekuasaan dalam artian kekuasaan atas hasil. Presiden General Motors, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet, atau perdana Menteri Tanzania masing-masing menjadi anggota elite politik bukan karena kemampuannya untuk memerintah bawahannya, tetapi lebih banyak karena pengaruhnya terhadap kebijaksanaan nasional. Karena itu kekuasaan di sini, **Putnam** artikan sebagai probabilitas untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan Negara, atau (dalam istilah teori sistem) probabilitas untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif.<sup>25</sup>

## 1. Kerangka Konseptual

Dari penjelasan di atas tentang sejumlah konsep mengenai – secara berurutan – pengertian strategi politik, partai politik, partisipasi politik, dan elit, penulis ingin merumuskan konsep strategi politik Partai Demokrat (PD) dalam memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dalam penelitian ini.

Partai politik dalam penelitian ini adalah partai yang bernama Partai Demokrat (PD) yang secara struktural terdiri atas 1 Dewan Pimpinan Pusat (DPP), 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi, 471 Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 7 dewan pimpinan luar negeri.

Dalam penelitian ini makna strategi difokuskan sebagai langkah taktis, sistematis, dan segala persiapan yang dilakukan Partai Demokrat, khususnya memasuki tahun 2005 – sebagaimana pengakuan Presiden SBY–dalam mendapatkan kepercayaan rakyat pada Pemilihan Umum 2009.

---

<sup>23</sup> Pemikiran Harold Laswell ini dikutip Soeleman Soemardi, Cara-cara Pendekatan “kekuasaan” sebagai gejala sosial, dalam Miriam Budiardjo (eds), Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 34

<sup>24</sup> Op.cit, hal.36

<sup>25</sup> Op.cit, hal 81

Elit dalam penelitian ini sebagaimana uraian di atas adalah mereka yang menempati posisi tinggi dalam struktur dan memiliki kekuasaan, atau lebih tepatnya kekuasaan yang didefinisikan dalam artian kekuasaan atas hasil. Pada tataran ini yang dimaksud adalah mereka yang memiliki posisi strategis dalam tubuh Partai Demokrat.

Sedangkan perilaku politik yang dimaksud adalah perilaku politik yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok oleh para anggota Partai Demokrat dalam memenangkan pemilihan umum 2009. Menuju kemenangan pemilu 2009 tentu saja dibutuhkan beberapa rencana strategis yang mewujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan partai sebagai jalur partisipasi politik bagi para pengurusnya.

Kemampuan Partai Demokrat dalam menjaga dan mempertahankan 42 persen pemilih tetapnya antara Pemilu 2004 – 2009 bukan tanpa usaha. Bagaimana kebijakan-kebijakan strategis partai baik internal maupun eksternal menjadi fokus utama persiapan Partai Demokrat dalam pertarungan kedua kalinya. Dan mereka sekali lagi memenangkannya dengan tingkat kesuksesan 300 persen. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, maka kerangka penelitian akan dibangun dalam kerangka, sebagai berikut:

